

KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD DI KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN

Hany Asyifah Salsabila
NPP. 31.0221

Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email: hanyasyifah0802@gmail.com

Pembimbing skripsi : Drs. Maichel Wutoy, MM

ABSTRACT

Problem / Background (GAP): This research discusses the low representation of women in the DPRD members in Palembang City, as evidenced by the fact that in 2014-2019 the representation of women who were members of the DPRD was 9 people (18%), while in 2019-2024 there was The decrease was 5 people (10%) so it did not meet the quota expected by the government, namely 30% representation of women in the legislature. **Purpose:** The purpose of this research is to find out why women's political representation as members of the DPRD in Palembang City is low, to find out the inhibiting and supporting factors and to find out the efforts of political parties in Palembang City in enforcing regulations regarding the representation of women candidates in the nomination process for legislative elections for DPRD members in Palembang City. **Methods:** This research uses qualitative methods with data collection techniques of observation, interviews and documentation studies. This research was analyzed using the Theory of Electoral Representation according to Hanna F Pitkin (1967) which consists of four dimensions, namely Representative, Represented, Substance of Representative and Context. **Results:** Women's representation in the Palembang City DPRD is still low due to several inhibiting factors, namely socio-cultural factors such as the patriarchal culture that is still inherent in society, lack of social closeness with society and the marginalization of women. Educational factors such as lack of knowledge and understanding of politics. Psychological factors such as the lack of self-confidence of female legislative candidates in competing with men in elections. Economic factors for legislative candidates such as campaign operational funds and so on. **Conclusion:** The low representation of women in the Palembang City DPRD is influenced by internal factors for legislative candidates as well as external factors and to increase women's representation, efforts are needed to increase the human resources of female legislative candidates through political education and training programs held by political parties continuously, so that it is hoped that legislative candidates women can be actively involved in politics to voice women's interests.

Keywords: Women's Representation, DPRD, Politics

ABSTRAK

Permasalahan / Latar Belakang (GAP): Penelitian ini membahas mengenai keterwakilan perempuan pada anggota DPRD di Kota Palembang yang masih rendah dibuktikan bahwa di tahun 2014-2019 keterwakilan perempuan yang menduduki anggota DPRD sebanyak 9 orang (18%), sedangkan tahun 2019-2024 mengalami penurunan yaitu berjumlah 5 orang (10%) sehingga belum memenuhi kuota yang diharapkan oleh pemerintah yaitu 30% keterwakilan perempuan di legislatif. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui mengapa keterwakilan politik perempuan sebagai anggota DPRD di Kota Palembang rendah, mengetahui faktor penghambat dan pendukung serta mengetahui upaya partai politik di Kota Palembang dalam menegakkan aturan tentang keterwakilan calon perempuan pada proses pencalonan pemilu legislatif anggota DPRD di Kota Palembang. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Penelitian ini dianalisis menggunakan Teori Keterwakilan Elektoral menurut Hanna F Pitkin (1967) yang terdiri Empat Dimensi yaitu Wakil, yang Terwakili, Substansi Perwakilan Dan Konteks. **Hasil/Temuan:** Keterwakilan perempuan di DPRD Kota Palembang masih rendah disebabkan oleh beberapa faktor penghambat yaitu Faktor sosial budaya seperti budaya patriarki yang masih melekat pada masyarakat, kurangnya kedekatan sosial dengan masyarakat dan marginalisasi perempuan. Faktor pendidikan seperti kurangnya pengetahuan dan pemahaman politik. Faktor psikologi seperti kurangnya kepercayaan diri caleg perempuan dalam bersaing dengan laki-laki dalam pemilu. Faktor ekonomi caleg seperti dana operasional kampanye dan lain sebagainya. **Kesimpulan:** Rendahnya keterwakilan perempuan pada DPRD Kota Palembang dipengaruhi oleh faktor internal calon legislatif maupun faktor eksternal dan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan ini diperlukan upaya peningkatan sumber daya manusia calon legislatif perempuan melalui program pendidikan dan pelatihan politik yang diadakan oleh partai politik secara terus menerus, sehingga di harapkan caleg perempuan dapat terlibat aktif dalam politik untuk menyuarakan kepentingan perempuan.

Kata Kunci : Keterwakilan Perempuan, DPRD, Politik

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di Indonesia, tingkat partisipasi perempuan dalam politik telah dijamin Secara yuridis formal di dalam UUD 1945, Tap MPR, dan Garis-Garis Besar Haluan Negara. Sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu pasal 28 H ayat (2) yang menyatakan “setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Negara Indonesia menerapkan sistem kuota 30% untuk memfasilitasi peluang politik perempuan. Namun, dalam penilaian yang realistis, hal ini tidak cukup menjawab kebutuhan posisi perempuan, mengingat jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Stanley berpendapat bahwa perempuan sangat layak memasuki dunia politik, mengingat tingkat kinerja dan pencapaian karir mereka yang relatif tinggi jika dilihat dari karakteristik pribadi perempuan. Perempuan, sebagai agen perubahan, mempunyai potensi untuk melakukan perubahan yang berarti. Partisipasi perempuan dalam politik memberikan dampak positif bagi dirinya dan lingkungannya. Namun kenyataannya, memasuki dunia politik bagi perempuan bukanlah proses yang mudah.

Indonesia berupaya meningkatkan proporsi perempuan yang terlibat dalam kegiatan politik praktis. Sebagaimana dasar hukum yang tercantum di Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR yang mengamanatkan partai politik untuk menjamin keterwakilan setidaknya 30% perempuan dalam pembentukan dan pengelolaan struktur pusatnya. Meskipun target kuota 30% anggota legislatif perempuan telah ditetapkan, namun target tersebut belum pernah tercapai sepenuhnya. Pada pemilu 2009, terpilih 101 anggota DPR perempuan, namun pada periode 2014-2019, angka tersebut menurun menjadi 97 perempuan dari total 560 anggota DPR. Menurut Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di DPR Ida Fauziah, keterwakilan perempuan di legislatif pusat saat ini sedang mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya minat perempuan untuk terlibat dalam partisipasi politik. Selain itu, terdapat persepsi bahwa partai politik kurang akomodatif terhadap partisipasi perempuan. Faktor kedua ini dapat diatasi melalui penerapan kebijakan dan peraturan yang tepat sasaran. Belum tercapainya kuota 30 persen anggota DPR perempuan tentu menjadi persoalan yang perlu diperhatikan dengan seksama, karena keterwakilan perempuan di parlemen itu sangat penting mengingat penyusunan undang-undang di berbagai sektor juga terkait dengan perempuan. Kehadiran perempuan di ranah politik praktis yang dibuktikan dengan keterwakilan perempuan di parlemen menjadi syarat mutlak bagi terciptanya budaya pengambilan kebijakan publik yang ramah dan sensitif pada kepentingan perempuan. Tanpa keterwakilan perempuan di parlemen dalam jumlah yang memadai, kecenderungan untuk menempatkan kepentingan laki-laki sebagai pusat dari pengambilan kebijakan sulit di bendung.

Di Kota Palembang keterwakilan perempuan yang terpilih menduduki anggota DPRD mengalami penurunan. Hal tersebut terlihat dari data pada tahun 2014-2019 keterwakilan perempuan yang menduduki anggota DPRD sebanyak 9 orang (18%), sedangkan tahun 2019-2024 mengalami penurunan yaitu berjumlah 5 orang (10%). Berdasarkan data pemilihan DPRD di Kota Palembang terlihat bahwa jumlah kuota caleg perempuan sudah memenuhi kuota 30% namun tingkat keterwakilannya masih rendah belum memenuhi kuota 30%, hal tersebut di sebabkan banyaknya problematika politik yang dihadapi calon legislatif perempuan di Kota Palembang yang menyebabkan minimnya naungan perempuan untuk bisa maju berpolitik.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Pasal 65 ayat (1) tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD menyatakan bahwa setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPRD, DPD, dan DPR sekurang-kurangnya 30% legislatif perempuan. Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD pada Pasal 8 ayat (1) huruf d yang menyebutkan: “Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat.

Keterwakilan Perempuan di Kota Palembang belum memenuhi kuota yang di amanatkan oleh undang-undang yakni 30% calon legislatif perempuan. Pada tahun 2014-2019 yang menduduki anggota DPRD sebanyak 9 orang (18%), sedangkan tahun 2019-2024 mengalami penurunan yaitu berjumlah 5 orang (10%). Berdasarkan data tersebut tingkat keterwakilan perempuan di DPRD Kota Palembang, belum sesuai dengan kondisi ideal yang diinginkan. Masyarakat masih enggan memilih calon legislatif perempuan. Partai politik hanya menjadikan calon legislatif perempuan sebagai pelengkap persyaratan untuk memenuhi kuota perempuan, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai keterwakilan perempuan pada anggota DPRD di Kota Palembang yang masih rendah, faktor penghambat dan pendukungnya serta upaya yang dilakukan partai politik untuk meningkatkan keterwakilan perempuan pada anggota DPRD di Kota Palembang.

1.3. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, ada beberapa penelitian terdahulu yang pertama, penelitian oleh Made Ananda Putri dan Ni Nyoman Sukerti (2020) berjudul Pengaruh Affirmative Action Terhadap Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi Bali menunjukkan bahwa pengaruh Affirmative Action terhadap 30% partisipasi perempuan Bali dalam pencalonan anggota legislatif meningkat tetapi untuk tingkat terpilihnya perempuan yang duduk di DPR-RI masih kurang. Sedangkan untuk keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Bali mengalami peningkatan.

Kedua, penelitian oleh Syabilla Linggarani Andralusia (2021) berjudul Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu 2019 (Studi Tentang Fenomena 36% Legislator Perempuan di DPRD Kota Surabaya Periode 2019-2024) membahas tentang apa saja upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan keterwakilan perempuan di DPRD Kota Surabaya mendapatkan kuota melebihi 30% yang hasilnya bahwa UU No.7 Th 2017 pasal 92 atau 11 terkait kuota sebesar 30% keterwakilan perempuan dari setiap partai politik dalam pemilihan umum legislatif menjadi ujung tombak meningkatkan keterwakilan perempuan di kursi legislatif DPRD Kota Surabaya.

Ketiga, penelitian oleh Mustanul Sania Huda (2021) berjudul Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 (Studi Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Di Kabupaten Magetan) yang membahas tentang apa saja penyebab minimnya perempuan dalam ranah politik dan tuntutan kesetaraan gender. Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa setelah UU No.8 tahun 2012 diimplementasikan akan tetapi belum maksimal. Partai politik masih ada yang tidak memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan serta penempatan perempuan hanya sebatas memenuhi kuota sehingga belum mendapatkan posisi strategis.

Keempat, penelitian oleh Ani Martini (2021) berjudul Keterwakilan Perempuan Dalam Keanggotaan Legislatif Di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah Periode 2019-2024. Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis mengenai minimnya dukungan berpengaruh dalam kinerja anggota legislatif perempuan dalam parlemen. Temuan penelitian menunjukkan bahwa proporsi perempuan di legislatif Kabupaten Sukoharjo periode 2019-2024 masih rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor internal, antara lain faktor kepercayaan diri perempuan, hubungan sosial, beban ganda, dan faktor transportasi politik. Selain itu, faktor eksternal seperti budaya patriarki dan kendala politik juga berperan.

Kelima, penelitian oleh Irsyad Jomisra (2022) berjudul Keterwakilan Perempuan Dalam Legislatif Terkait Budaya Patriarki di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat. Dari hasil temuan menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di legislatif ini hanya untuk pemenuhan kuota 30% dan perempuan masih lemah dalam pendekatan dengan masyarakat serta masih tingginya budaya patriarki.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya dimana penulis memfokuskan secara detail mengenai keterwakilan perempuan yang masih rendah dengan menjelaskan faktor penghambat dan pendukung keterwakilan perempuan pada DPRD Kota Palembang yang dianalisis dengan menggunakan Teori Keterwakilan Elektoral Hanna F Pitkin (1967) yaitu terdiri Empat Dimensi yaitu Wakil, yang Terwakili, Substansi Perwakilan Dan Konteks. Penelitian ini juga memfokuskan secara detail pada upaya partai politik di Kota Palembang dalam menegakkan aturan keterwakilan perempuan dalam proses pencalonan pemilu anggota DPRD Kota Palembang, sehingga kebijakan affirmative 30% dapat terwujud dan bukan hanya menjadi persyaratan belaka.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa keterwakilan perempuan sebagai anggota DPRD di Kota Palembang rendah, mengetahui apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung keterwakilan perempuan sebagai anggota DPRD di Kota Palembang dan mengetahui apa saja upaya Partai Politik di Kota Palembang dalam menegakkan aturan tentang keterwakilan calon perempuan pada proses pencalonan pemilu legislatif anggota DPRD di Kota Palembang.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dimana dapat menyampaikan maksud dari peneliti dengan lebih detail dan jelas. Peneliti berusaha untuk mendapatkan fakta-fakta yang terdapat di lapangan dan menuangkannya secara sistematis aktual dan akurat selanjutnya dari fakta yang didapatkan tersebut dapat ditarik kesimpulan secara umum.

Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara yang terdiri dari 5 (Lima) orang dari KPU Kota Palembang, 1 (Satu) Orang dari DPRD Kota Palembang dan 16 (Enam Belas) orang dari partai politik masing-masing 1 (Satu) perwakilan partai politik.

Dalam menganalisis hasil penelitian penulis menggunakan Teori Keterwakilan Elektoral menurut Hanna F Pitkin (1967:11) yaitu terdiri Empat Dimensi yaitu Wakil, yang Terwakili, Substansi Perwakilan Dan Konteks yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dimensi Wakil, merujuk pada mereka yang dipilih oleh rakyat dalam suatu pemilu. Indikator dalam penelitian ini yaitu pihak yang dipilih dalam pemilu, tingkat pendidikan dan pemahaman terhadap partai politik.
2. Dimensi yang terwakili, merujuk pada pemilih yang memiliki hak pilih sebagai simbol rakyat secara keseluruhan. Dalam hal ini rakyat sebagai pihak yang diwakili mempunyai peran penting dalam terpilihnya wakil rakyat di parlemen. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah rakyat yang memiliki hak pilih dan kepercayaan terhadap wakil.
3. Dimensi Substansi Perwakilan, berkaitan dengan kepentingan dan tuntutan pihak yang mewakili. Hal ini kemudian dipertahankan sebagai kebijakan publik oleh pihak yang mewakilinya.
4. Dimensi Konteks, proses perwakilan bergantung pada konteks yang berlaku yang mencakup sistem pemilu, sistem kepartaian, dan budaya politik di suatu negara.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada hasil penelitian dan pembahasan ini penulis akan menguraikan keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum anggota DPRD di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Hasil penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan yang ada yaitu mengapa keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum anggota DPRD di Kota Palembang rendah, apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung keterwakilan perempuan serta upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan pada anggota DPRD di Kota Palembang. Selanjutnya data yang di peroleh tersebut di analisis dengan menggunakan Teori Keterwakilan Elektoral Menurut Hanna F Pitkin (1967:11) sebagaimana penulis uraikan di bawah ini.

3.1. Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan

Dalam menganalisis keterwakilan perempuan dalam keanggotaan legislatif penulis menggunakan Teori Keterwakilan Elektoral Menurut Hanna F Pitkin (1967:11), konsep keterwakilan politik terdiri dari 4 (empat) dimensi, diantaranya yaitu wakil, yang diwakili, substansi perwakilan dan konteks.

3.1.1. Dimensi Wakil

1. Pihak yang di pilih dalam pemilu
Keterwakilan perempuan dalam pemilu di Kota Palembang sudah cukup banyak didukung oleh masyarakat dan partai politik, namun masih kalah dibandingkan dengan caleg laki-laki, serta keterwakilan perempuan di DPRD sangat penting untuk bisa menyuarakan aspirasi terkait isu-isu perempuan terutama di Kota Palembang.

2. **Tingkat Pendidikan**
Tingkat pendidikan, keahlian dan pengalaman organisasi dapat mempengaruhi terpilihnya calon legislatif perempuan. Tingkat pendidikan anggota legislatif perempuan di Kota Palembang beragam dari D3 sampai S-1.
3. **Pemahaman terhadap partai politik**
Caleg perempuan di Kota Palembang harus memahami pendidikan politik agar mendapatkan ilmu dan pemahaman mengenai politik dan partai politik. Selain itu harus membangun jaringan dengan masyarakat, organisasi perempuan serta melatih berkomunikasi dan keterampilan publik.

3.1.2. Dimensi Pihak yang di Wakili

1. **Rakyat yang memiliki hak pilih**
 - a. **Kondisi Awal Pemilih**
Kondisi sosial budaya dan nilai tradisional di Kota Palembang mempengaruhi faktor pemilih untuk memilih calon anggota legislatif perempuan seperti budaya patriarki, ketidakpercayaan terhadap kemampuan perempuan dalam dunia politik, munculnya politik uang dan lain sebagainya.
 - b. **Media Massa**
Calon legislatif perempuan masih belum maksimal melakukan marketing politik melalui media (pull marketing) menyebabkan masih rendah perempuan dalam keanggotaan legislatif di DPRD Kota Palembang.
 - c. **Partai Politik**
Reputasi partai politik sangat mempengaruhi pemilih untuk memilih calon legislatif nya. Reputasi partai politik dapat dilihat dari total perolehan suara yang diperoleh dalam pemilu dimana keterwakilan perempuan masih sangat rendah.
2. **Kepercayaan terhadap wakil**
Rakyat dapat melihat wakil dipilih oleh masyarakat karena memiliki kemampuan untuk mengenali dan merumuskan kepentingan terwakil dimana wakil diberi kepercayaan untuk bertindak tanpa harus mengonsultasikan semua hal kepada terwakil. Masyarakat di Kota Palembang cukup menerima keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif meskipun belum setara jika dibandingkan dengan laki-laki.

3.1.3. Dimensi Substansi Perwakilan

1. **Kepentingan dan tuntutan dari pihak yang diwakili untuk kemudian diteruskan menjadi kebijakan publik oleh pihak yang mewakili.**
Tuntutan dan kepentingan dari kaum perempuan belum maksimal dipenuhi oleh anggota legislatif DPRD Kota Palembang karena kebijakan terkait perempuan di Kota Palembang masih tergolong sedikit dan belum sebanding dengan kepentingan perempuan di Kota Palembang

3.1.4. Dimensi Konteks

1. Sistem Pemilu

Sistem pemilu di Kota Palembang sudah cukup baik dalam pencalonan legislatif dari masing-masing partai politik sudah mencukupi 30%, tetapi saat pembagian kursi di legislatif belum bisa mencukupi kuota 30%. Di Kota Palembang keterwakilan perempuan masih berada di angka 10%.

2. Sistem Kepartaian

Sistem kepartaian di Kota Palembang ini menggunakan sistem multipartai sama halnya dengan negara Indonesia dan partai politik dalam perkaderan belum mementingkan pendidikan politik terutama bagi calon atau anggota perempuan.

3. Budaya Politik

Budaya politik di Kota Palembang tahun 2024 memiliki partisipasi kaum millineal dan generasi Z yang mendominasi yang sangat berantusias dalam ikut serta pemilu. Tetapi masih kurangnya kesadaran masyarakat akan calon legislatif perempuan untuk di pilih dan mereka lebih memilih caleg laki-laki yang lebih pantas di dunia politik.

3.2.Faktor Penghambat Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan

Terdapat beberapa hambatan dalam mencapai keterwakilan perempuan di lembaga legislatif di Kota Palembang yaitu : 1) adanya budaya patriarki, 2) Kurangnya percaya diri perempuan, 3) Kurangnya pengetahuan dan pendidikan politik, 4) Kurangnya Sosialisasi visi dan misi caleg perempuan, 5) Kurangnya dana operasional, 6) Kurangnya kaderisasi dan permasalahan politik lainnya.

3.3.Faktor Pendukung Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan

Keterwakilan perempuan dalam legislatif juga harus adanya faktor pendukung untuk keberhasilan caleg perempuan dalam menduduki kursi di legislatif Kota Palembang yaitu sebagai berikut : 1) Adanya keinginan atau ketertarikan perempuan untuk berpartisipasi dalam pencalonan legislatif, 2) Adanya kebijakan afirmatif dari pemerintah 30% setiap partai politik untuk pencalonan legislatif perempuan, 3) Perempuan yang memiliki pendidikan tinggi dan pengalaman yang mumpuni akan menjadi utama dalam pencalonan legislatif, 4) Memiliki kecakapan sosial dan bersosialisasi dengan masyarakat dan 5) Adanya dukungan partai politik, dukungan keluarga dan dukungan dana

3.4. Upaya yang dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Wakil Pada Perempuan Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan

Upaya Partai politik untuk membantu dan mendukung keterwakilan perempuan di DPRD Kota Palembang yaitu : 1) Memberikan Pelatihan dan pendidikan politik kepada calon legislatif perempuan, 2) Memberikan dukungan dan sumber daya seperti dana kampanye, akses terhadap jaringan politik

dan bantuan teknis lainnya, 3) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui media sosial dan 4) Melakukan sosialisasi kepada pemilih pemula bahwa keterwakilan perempuan sangat penting berada di legislatif.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh Made Ananda Putri dan Ni Nyoman Sukerti (2020) berjudul Pengaruh Affirmative Action Terhadap Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi Bali menunjukkan bahwa adanya pengaruh dari kuota 30% partisipasi perempuan Bali dalam pencalonan anggota legislatif meningkat tetapi untuk tingkat terpilihnya perempuan yang duduk di DPR-RI masih kurang. Sedangkan untuk keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Bali mengalami peningkatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa di Provinsi Bali peran perempuan dalam upacara adat dan kegiatan sosial mendorong partisipasi mereka dalam politik sedangkan di Kota Palembang masih adanya budaya patriarki lebih dominan di masyarakat, sehingga menghambat perempuan untuk berpartisipasi dalam politik.

Penelitian yang dilakukan oleh Syabilla Linggarani (2021) yang berjudul keterwakilan perempuan dalam pemilu 2019 (Studi Tentang Fenomena 36% Legislator Perempuan di DPRD Kota Surabaya Periode 2019-2024) mengungkapkan bahwa keterwakilan perempuan di legislatif Kota Surabaya sudah mencapai target 30% sesuai kebijakan pemerintah dikarenakan adanya usaha dari partai politik yang mendukung pendidikan politik berbasis perempuan yang menjadi wadah peningkatan pengetahuan politik bagi perempuan yang memiliki potensial di kursi legislatif. Untuk penelitian yang dilakukan oleh penulis ini keterwakilan perempuan di legislatif Kota Palembang di tahun 2019-2024 mengalami penurunan sampai di angka 10% yang dimana itu belum memenuhi kebijakan affirmative 30% dan partai politik belum maksimal dalam kaderisasi, pendidikan politik maupun bantuan dana operasional.

Penelitian yang dilakukan oleh Mustanul Sania Huda (2021) yang berjudul Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 (Studi Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Politik di Kabupaten Magetan) mengungkapkan bahwa di Kabupaten Magetan ini masih ada partai politik yang tidak memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan dan kondisi masyarakat yang masih menempatkan laki-laki yang utama untuk menduduki kursi di legislatif. Dengan begitu penulis mengungkapkan bahwa di Kota Palembang untuk partai politik sudah memenuhi pencalonan legislatif perempuan 30%, tetapi dalam mendapatkan kursi belum maksimal.

Penelitian yang dilakukan oleh Ani Martini (2021) yang berjudul Keterwakilan Perempuan Dalam Keanggotaan Legislatif di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah Periode 2019-2024 mengungkapkan bahwa keterwakilan perempuan dalam keanggotaan legislatif di Kabupaten Sukoharjo masih rendah di sebabkan oleh faktor internal yaitu kepercayaan diri dari perempuan, hubungan sosial, beban ganda dan ongkos politik serta faktor eksternal yaitu budaya patriarki dan kendala politik. Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini hasil temuannya hampir sama, tetapi ada beberapa temuan baru di Kota Palembang yaitu bahwa keterwakilan perempuan masih rendah di sebabkan oleh kurangnya sosialisasi visi dan misi caleg perempuan kepada masyarakat dan kurangnya kaderisasi dari partai politik.

Penelitian yang dilakukan oleh Irsyad Jomisra (2022) berjudul Keterwakilan Perempuan Dalam Legislatif Terkait Budaya Patriarki di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat. Dari hasil temuan menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di legislatif ini hanya untuk pemenuhan kuota 30% dan perempuan masih lemah dalam pendekatan dengan masyarakat serta masih tingginya budaya patriarki. Penelitian tersebut sama halnya di Kota Palembang bahwa partai politik masih kurang proaktif dalam mencalonkan perempuan atau memberikan dukungan yang memadai selama kampanye.

3.6 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan adanya Undang-undang Affirmatif Action menetapkan bahwa keterwakilan perempuan 30% di legislatif hanya dapat dijamin melalui pencalonan partai politik dan tidak melalui keterpilihan di lembaga legislatif. Akibatnya, partai politik hanya mencari kader agar memenuhi kuota yang tersedia untuk partisipasi mereka dalam pemilihan legislatif.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh peneliti mengenai Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan Teori Hanna F Pitkin (1967:11) yang memiliki 4 dimensi yaitu wakil, yang di wakili, substansi perwakilan dan konteks dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Keterwakilan perempuan di DPRD Kota Palembang masih sangat rendah karena:
 - a. Dimensi Wakil
Wakil perempuan dipilih berdasarkan kedekatan sosial, pendidikan politik kurang diperhatikan sehingga pemahaman politik dari caleg perempuan belum memadai dan kurangnya sosialisasi dari caleg perempuan kepada masyarakat.
 - b. Dimensi yang Diwakili
Dipengaruhi oleh kondisi awal pemilih yaitu masih adanya budaya politik uang dan patriarki. Media massa belum dimanfaatkan secara maksimal dan reputasi parpol mempengaruhi pemilih untuk melakukan pemilihan terhadap calonnya.
 - c. Dimensi Substansi Perwakilan
Dalam membuat tuntutan dan kepentingan dari kaum perempuan belum maksimal dipenuhi oleh anggota legislatif DPRD Kota Palembang karena kebijakan terkait perempuan di Kota Palembang masih tergolong sedikit dan belum sebanding dengan kepentingan perempuan di Kota Palembang.
 - d. Dimensi Konteks
Pencalonan caleg perempuan melalui partai politik sudah mencapai 30% tetapi belum memenuhi untuk mendapatkan kursi di legislatif. Selain itu dalam proses kaderisasi belum dilakukan secara maksimal dan budaya politik partisipan masyarakat meningkat namun tingkat keterwakilan perempuan menurun karena masyarakat enggan memilih caleg perempuan.
2. Faktor penghambat dan pendukung keterwakilan perempuan di DPRD Kota Palembang yaitu sebagai berikut :

- a. Faktor Penghambat, yang menjadi faktor penghambat keterwakilan perempuan di DPRD Kota Palembang antara lain kurangnya percaya diri perempuan, kurangnya pengetahuan dan pendidikan politik, kurangnya sosialisasi visi misi, kurangnya dana, adanya budaya patriarki, kurangnya kaderisasi dan permasalahan politik lainnya.
- b. Faktor Pendukung, yang menjadi faktor pendukung keterwakilan perempuan di DPRD Kota Palembang antara lain adanya ketertarikan perempuan untuk berpolitik, kebijakan afirmatif 30%, pendidikan tinggi perempuan, memiliki kecakapan sosial dan bersosialisasi dengan masyarakat, adanya dukungan partai politik, dukungan keluarga dan dukungan dana.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu Kota Palembang saja sebagai model studi kasus yang di pilih.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar caleg perempuan harus mengikuti program pelatihan dan pendidikan politik yang diadakan oleh partai politik untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas politik caleg dan partai politik memberikan dukungan dan sumber daya seperti dana kampanye, peningkatan akses terhadap jaringan politik, dan bantuan teknis lainnya dan meningkatkan kesadaran di dalam partai tentang pentingnya keterwakilan perempuan dalam politik.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan Ketua KPU Kota Palembang beserta jajarannya, Sekretaris DPRD Kota Palembang dan Semua Perwakilan Partai Politik yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU

- Amin Nurdin dan Ahmad Abrori. 2006. *Mengerti Sosiologi: Pengantar untuk Memahami Konsep-Konsep Dasar*. Jakarta: UIN Jakarta Press
- A. Rahman. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Creswell, John W. 2016. *Research Design : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Edisi Keempat (Cetakan Kesatu). Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Damsar, 2010. *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Efriza. 2012. *Political Explore Sebuah Kalian Ilmu Politik*, Bandung: ALFABET
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif. Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Kantaprawira, R, 2004, *Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar*. Bandung: Sinar Algensindo.
- Leo Agustino, 2007. *Perihal Ilmu Politik; Sebuah Bahasan Memahami Ilmu Politik*, .Yogyakarta: graham ilmu

- Mary G Kweit dan Robert W. Kweit. 1986. *Konsep dan Metode Analisis Politik terj.Ratnawati*, Jakarta: PT. Bina Aksara
- Rush dan Althoff. 2018. *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Ramlan Surbakti. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo
- Sarlito Wirawan Sarwono. 2015. *Teori- Teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers
- Simangunsong, Fernandes. 2017. *Metodologi Penelitian Pemerintahan : Teoritik- Legalistik-Empirik-Inovatif*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Zulfikri Sulaeman. 2010. *Demokrasi Untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta*, Jakarta:Kompas Media Nusantara

SUMBER SKRIPSI DAN JURNAL

- Acu Nurhidayat, Fenomena Golput di Indonesia Pasca Orde Baru (Studi Kasus Pada Pemilu 2004), 2009, Jakarta : Skripsi Fakultas Ushuludin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Dahlia Sukma dan Bobby Rahman, Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Kajian Di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013). Unimal Press.
- Milbrath, Lester W. and Goel M.L. *Political Participation : How and Why Do People Get Involved in Politics?*. Chicago. Rand McNally. 1997
- Olsen, J.B., and Eadie, D. C. *The Game Plan: Governance with Foresight*. Washington: Council of State Planning Agencies. 2007.
- Paige, R.M. *Internationalization of Higher Education: Performance Assessment and Indicators*. TIPS, 6(14). 2005.

SUMBER LAINNYA

- Ahmad Rafli, KPU Kota Palembang Tetapkan Daftar Pemilih Berkelanjutan Mencapai 1.004.144 orang, <https://sumsel.antaranews.com/berita/675949/kpu-kota-palembang-tetapkan-daftar-pemilih-berkelanjutan-mencapai-1004155-orang>, diakses pada 22 Agustus 2023 pukul 20.14 WIB
- Fahir, Teori dan Definisi Peran Menurut Para Ahli, diakses pada 28 September 2023 pukul 14.22 WIB.
- Media Indonesia, 2018, Survei Alvara: Milenial Cuek Terhadap Politik, 20 Oktober 2018.
- Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Indonesia, <https://www.uui.ac.id/meningkatkan-partisipasi-politik-masyarakat-indonesia>, diakses pada 22 Agustus 2023 pukul 21.01 WIB.
- KPU, Sosialisasi Rumah Pintar Pemilu Tahun 2024, <https://kota-palembang.kpu.go.id/berita/baca/8079/sosialisasi-rumah-pintar-pemilu-tahun-2024> diakses pada 24 September 2023 pukul 22.14 WIB.
- KPU Kabupaten Malang, Penjelasan Basis Pemilih Sasaran Relawan Demokrasi, <https://kpu-dmalangkab.go.id/berita/penjelasan-basis-pemilih-sasaran-sosialisasi-relawan-demokrasi/287/>, diakses pada 25 September 2023 pukul 21.34 WIB.

Pemerintah Kota Palembang, 2022, Rencana Kinerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang Tahun 2023.

